

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA POPAYATO
KECAMATAN POPAYATO KABUPATEN
POHUWATO**

Oleh

**SITI NURSUCIA ARDIN
E2119173**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA POPAYATO
KECAMATAN POPAYATO KABUPATEN
POHUWATO**

Oleh

**SITI NURSUCIA ARDIN
E2119173**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 07 September 2023**

PEMBIMBING I



**TAMSIR, SE., MM
NIDN : 0920057403**

PEMBIMBING II



**NG SYAMSI AH. B., SE., MM
NIDN : 0921018003**


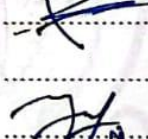
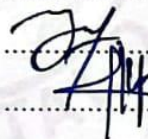
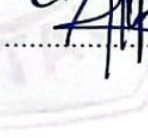
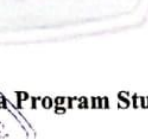
HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA POPAYATO KECAMATAN POPAYATO KABUPATEN POHUWATO

Oleh

SITI NURSUCIA ARDIN
E2119173

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Muhammad Anas, SE., MM : 
2. Haris Hasan, SE., MM : 
3. Sri Dayani Ismail, SE., MM : 
4. Tamsir, SE., MM : 
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM : 

Mengetahui :


Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901


Syamsul, SE., M.Si
NIDN: 0922018501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Orang pesimis
melihat kesulitan dlm setiap peluang.*

*Orang optimis
melihat peluang dlm setiap Kesulitan."
(Siti Nursucia Ardin)*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Suami Tercinta,
Kedua orang tua saya
Yang selalu mendoakan, dan memberikan nasihat kepada saya
agar bisa menjadi orang sukses.*

*Saudara-saudaraku tercinta yang selalu mendukung dan tak
henti memberikan doa,*

*Serta sahabat yang memberikan semangat
agar tidak mudah menyerah dan putus asa sampai saya bisa
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*

Special Buat:

**ALMAMATERKU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 07 September 2023
Yang Membuat Pernyataan



Siti Nursucia Ardin
E2119173

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato”. sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG).
- Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.
- Bapak Syamsul, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo.
- Bapak Tamsir, SE., MM selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.

- Ibu Ng Syamsiah. B, SE., MM, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
- Bapak Yusuf Dini Dahumu, selaku Kepala Desa Popayato, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis selama penyusunan usulan penelitian ini.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna, jika terdapat kelebihan dalam Skripsi ini, maka semua datangnya dari Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Juli 2023

(Penulis)

ABSTRACT

SITI NURSUCIA ARDIN. E2119173. THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON VILLAGE FUND MANAGEMENT IN POPAYATO VILLAGE, POPAYATO SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

The role of the internal control system is vital in creating an efficient, effective, and reliable government. This research aims to determine and analyze the effect of the internal control system on village funds management in Popayatao Village, Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Based on the results of data processing using SPSS-16, the correlation between the Internal Control System variable (X) and the village fund management variable (Y) gains a value of 0.443, which means that the correlation between the two variables is in the strong category, namely 44.3%. The correlation between the internal control system (X) and the village fund management variable (Y) is significant at 0.007 ($0.007 > 0.05$).

Keywords: internal control system, village fund management

ABSTRAK

SITI NURSUCIA ARDIN. E2119173. “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA POPAYATO KECAMATAN POPAYATO KABUPATEN POHUWATO.”

Peranan dari sistem pengendalian internal sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Popayatao Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh korelasi variable Sistem Pengendalian Internal (X) dan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) diperoleh nilai 0,443, yang artinya bahwa, korelasi antar kedua variable tersebut masuk dalam kategori hubungan yang kuat yaitu 44,3%. Korelasi sistem pengendalian internal (X) dan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah signifikan sebesar 0,007 ($0,007 > 0,05$).

Kata Kunci: Sistem pengendalian internal dan pengelolaan dana desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Desa	6
2.1.1. Pengertian Desa	6

2.1.2. Pemerintah Desa	7
2.1.3. Otonomi Desa	8
2.2. Sistem Pengendalian Internal	11
2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	11
2.2.2. Tujuan Pengendalian Internal	12
2.2.3. Komponen Pengendalian Internal	13
2.2.4. Unsur Pengendalian Internal	14
2.2.5. Indikator-Indikator Sistem Pengendalian Internal	16
2.3. Pengelolaan Dana Desa	19
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.3.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	27
2.4. Kerangka Pikir	29
2.5. Hipotesis	30
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	31
3.1. Objek Penelitian.....	31
3.2. Metode Penelitian	31
3.2.1. Desain Penelitian	31
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian	32
3.2.3. Populasi dan Sampel	33
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36

4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif	38
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel SPI (X)	39
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)	46
4.3. Pengujian Hipotesis	54
4.3.1. Analisis Regresi Sederhana	54
4.3.2. Analisis Korelasi dan Uji Signifikan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir	30
Gambar Struktur Perangkat Desa	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian	32
Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	39
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 1	39
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 2	40
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 3	40
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 4	41
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 5	42
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 6	42
Tabel 4.8. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 7	43
Tabel 4.9. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 8	44
Tabel 4.10. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 9	44
Tabel 4.11. Tanggapan Responden Variabel SPI Pada Item 10	45
Tabel 4.12. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 1	46
Tabel 4.13. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 2	47
Tabel 4.14. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 3	47
Tabel 4.15. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 4	48
Tabel 4.16. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 5	48
Tabel 4.17. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 6	49
Tabel 4.18. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 7	50
Tabel 4.19. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 8	50
Tabel 4.20. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 9	51
Tabel 4.21. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 10	52
Tabel 4.22. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 11	52
Tabel 4.23. Tanggapan Responden Variabel PDD Pada Item 12	53
Tabel 4.24. Analisis Regresi Sederhana	54
Tabel 4.25. Model Summary	55
Tabel 4.26. Uji Signifikan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian	61
Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian	62
Lampiran 3. Tabulasi Data	66
Lampiran 4. Output SPSS-16	68
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian	70
Lampiran 6. Surat Balasan Penelitian	71
Lampiran 7. Surat Bebas Plagiasi	72
Lampiran 8. Hasil Turnitin	73
Lampiran 9. Curriculum Vitae	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara resmi memberikan wewenang dan kebebasan bagi Desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri. Setiap desa di Indonesia diberikan dana yang ditransfer langsung dari APBN. Pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran dana Desa sebesar Rp 960,59 juta per desa. Untuk bobot Alokasi Dasar sebesar 69%, Alokasi Afirmasi 1,5%, dan Alokasi Formula 28%, dan Alokasi Kinerja 1,5% (Jakarta, Beritasatu.com). Dana yang diberikan pemerintah kepada Desa sangat besar maka pemerintah perlu memperhatikan kontrol dan pengawasan terhadap dana desa tersebut sehingga tidak terjadi banyak kebocoran dan kecurangan. Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) pemerintah desa harus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam mengelola dana desa.

Dalam menciptakan *good village governance* dibutuhkan sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai. Pengendalian internal dalam pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Peranan dari SPI sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Organisasi pemerintahan yang telah

memiliki SPI cenderung lebih efektif dan efisien dalam menjalankan organisasi. Terbukti kelemahan SPI dapat berdampak pada banyaknya laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kecurangan dalam mengelola dana Desa.

Pada tahun 2019 ditemukan kurang dari 100 kasus dari total 74.957 desa. Dari 100 kasus tersebut, hanya 67 laporan yang dinyatakan layak dilaporkan ke penegak hukum (Liputan6.com, Jakarta). Peran SPI ialah sebagai alat pemerintah untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Kepatuhan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan SPI sangat dibutuhkan agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Peran SPI dalam pemerintahan ialah memberikan landasan untuk akuntabilitas dan pengendalian manajemen dalam menjalankan pemerintahan, mencegah pencurian dan kecurangan, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi (INTOSAI GOV 9100, 2004). Menurut Ionescu (2016) SPI bisa berjalan secara efisien dengan mengutamakan tujuan yaitu perlindungan dana dan anggaran publik, penegakan peraturan dan hukum, pengembangan sistem akuntansi, pencegahan kecurangan dan korupsi, penerapan teknik baru untuk memverifikasi data dan informasi keuangan dalam administrasi publik.

PP No. 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam mendukung PP No. 60 tahun 2008, Presiden RI mengintruksikan agar meningkatkan peran SPI. Intruksi tersebut tertuang dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang peningkatan sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Isi dari Intruksi Presiden No.9 Tahun 2014 ialah pemerintah saat ini ingin mempercepat pengimplementasian sistem pengendalian internal disemua sektor dan wilayah agar terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan dana desa. Pemerintah desa wajib menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajiban ini menimbulkan banyak permasalahan pada pemerintah desa karena tingkat sumber daya manusia yang ada pada desa belum bisa sepenuhnya menerima SAP.

Melihat tujuan awal dari SPIP yang salah satunya adalah memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, SPIP memiliki dua tujuan dasar yang paling utama yaitu berupa penguatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan bagian utama dari reformasi birokrasi. Salah satu indikator yang menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Singkatnya semakin baik implementasi SPIP maka akan memberikan pengaruh positif pada kualitas Opini yang dikeluarkan oleh auditor BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini berarti bahwa setiap unsur dalam SPI harus menjadi acuan dan menjadi unsur utama dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :

“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato”?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data mengenai Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Pengaruh sistem pengendalian internal Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penelitian-penelitian berikutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang terkhusus dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktisi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kepala Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

3. Manfaat Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori-teori ilmu manajemen, serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota

yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di

bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa ataupun pembantu desa. Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.1.3. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu

komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa

yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2.2. Sistem Pengendalian Internal

Untuk dapat memahami bagaimana sistem pengendalian internal digunakan dalam kegiatan pengamanan kas, dibutuhkan pengetahuan mengenai konsep dasar pengendalian itu sendiri. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem pengendalian internal, tujuan sistem pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal dan komponen pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada manajemen bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai.

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Anggreini (2012:10) pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Pada umumnya, perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik, Chung, (2015:11).

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer Mulyadi (2014:163).

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:319) adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Mulyadi (2014:163), mengemukakan bahwa, tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.2.3 Komponen Pengendalian Internal

Menurut Kumaat (2011:16), sejalan dengan waktu, semakin didasari adanya berbagai faktor yang masih perlu diartikulasikan lebih jauh, seperti faktor manusia yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai perusahaan, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada *historical/current* data, dan kelemahan/kelemahan komunikasi internal. Jadi, sejak tahun 1992 COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) memperkenalkan kerangka pengendalian yang terdiri dari 5 unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian melingkupi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi.

2. Penilaian risiko

Semua organisasi menghadapi risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis.

3. Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi keterbatasan serta kesalahan.

4. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan manajemen.

5. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

2.2.4. Unsur Pengendalian Internal

Mulyadi (2014:164), berpendapat bahwa, unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
 - b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
- b) Pemeriksaan mendadak
- c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi
- d) Perputaran jabatan
- e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
- f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
- g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat

melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya.

2.2.5. Indikator-Indikator Sistem Pengendalian Internal

Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini dijadikan acuan dalam bentuk indikator-indikator penilaian yang bersumber dari PP No. 60 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian.

Untuk mengukur tingkat efektifitas lingkungan pengendalian, indikator yang digunakan adalah:

- a) Organisasi adalah mencakup proses pembentukan organisasi yang efektif dan efisien, penyusunan struktur dan rincian tanggung jawab.
- b) Sumber daya manusia adalah sub sistem dalam suatu organisasi sebagai upaya agar para pegawai dapat dimanfaatkan secara efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
- c) Kebijakan adalah ketentuan hukum sebagai landasan bagi pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan.
- d) Prosedur adalah rangkaian dari beberapa perintah atau aturan yang mewakili aktivitas yang dilakukan dengan peralatan dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan pimpinan.

2. Penilaian Resiko.

Untuk mengukur tingkat efektifitas bagaimana menangani semua resiko dalam pencapaian tujuan organisasi, indikator yang digunakan adalah:

- a) Identifikasi Resiko, adalah melaksanakan identifikasi tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dengan menetapkan titik kritis serta menyusun daftar resiko.
- b) Penanganan Resiko adalah upaya yang akan dilakukan untuk menangani resiko yang telah teridentifikasi, untuk mengeliminasi penyebab terjadinya resiko.

3. Pengendalian.

Untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan pengendalian, indikator yang digunakan adalah:

- a) Review atas Kinerja adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi oleh seluruh personil serta untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
- b) Pemisahan Fungsi adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen untuk mencapai tujuan.

4. Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengukur tingkat efektifitas informasi dan komunikasi, indikator yang digunakan adalah:

- a) Pencatatan adalah untuk menjamin keandalan proses pengolahan data menjadi keluaran yang bebas dari kekeliruan dan kesalahan yang fatal/signifikan.

- b) Pelaporan adalah kebijakan, prosedur, teknik , dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen untuk mencapai tujuan.

5. Pemantauan dan Pengendalian Intern.

Untuk mengukur tingkat efektifitas pemantauan dan pengendalian intern, indikator yang digunakan adalah:

- a) Pemantauan yang berkelanjutan adalah Penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan Instansi Pemerintah.
- b) Evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- c) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit adalah Penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sesuai ketentuan.

2.2. Pengelolaan Dana Desa

2.2.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber Dana Desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil

dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Dana Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan.

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12) menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media piñata usahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan Dana Desa ialah kegiatan mengatur Dana Desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan piñata usahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penata usahaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - Buku kas umum
 - Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penata usahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan danb. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pertanggung jawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban untuk APBDesa

dilaksanakan melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

f. Pengawasan

Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

2.3.2. Asas Pengelolaan Dana Desa.

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik

kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

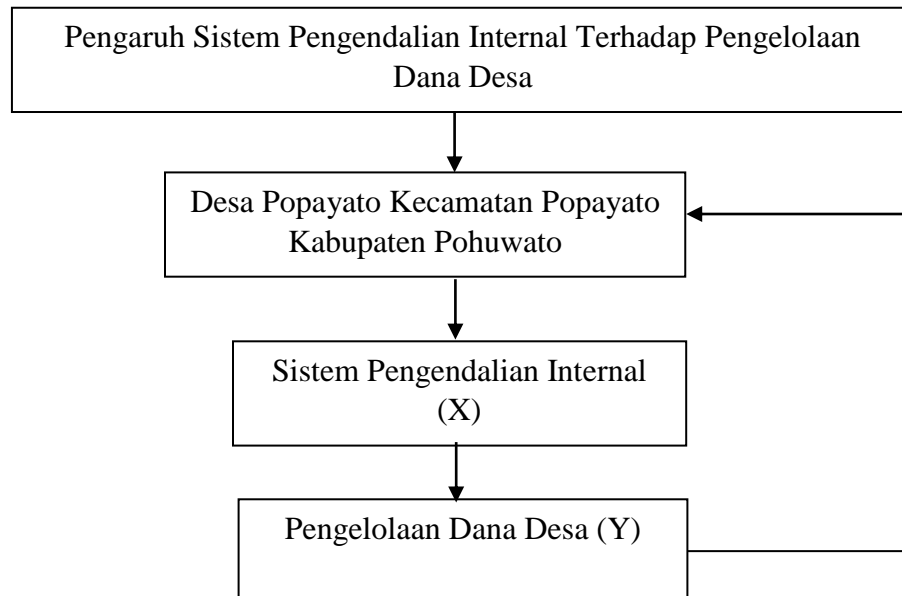
3. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.4. Kerangka Pikir

Sugiyono (2008:60) mengemukakan bahwa kerangka pikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Gambar.
Kerangka Pikir



2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah “Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato”.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa (Y).
2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:96). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal (X).

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Transparan Akuntabel Partisipasi	Akses Dokumen Pengelolaan Mudah Diperoleh Pengumuman Pengelolaan Transparan Rencana strategi kebijakan Indikator evaluasi Pengelolaan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan
Sistem Pengendalian Internal (X)	Lingkunagn Pengendalian Penilaian Resiko Pengendalian Informasi & Komunikasi Pemantauan	Penilaian Kualitas Standar Kompetensi Identifikasi Resiko. Penanganan Resiko Kebijakan Penganaman Fisik Pengembangan Rencana Informasi Tepat Waktu Pertanggungjawaban Tepat Waktu Tindak Lanjut Hasil Penilaian Reviu Temuan

Sumber : PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 & PP No. 60 Tahun 2008

3.2.3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 1 orang, BPD 5 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Bendahara 1 orang, Kepala urusan Tata Usaha 1 orang, Kepala Urusan Perencanaan 1 orang, Kepala urusan Pemerintahan 1 orang, Kepala Seksi Kesejahteraan 1 orang, dan Kepala Seksi Pelayanan Desa 1 orang, Inspektorat Daerah 9 orang dan Aparat Kecamatan 8 orang sehingga total responden sebanyak 30 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling*

jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field reserach bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
2. Kuisisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pengelolaan dana desa menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:92). Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

3.2.5. Metode Analisis Data

Untuk melihat pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, maka peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel dependent (Pengelolaan Dana Desa)

a = Koefisien regresi (konstanta)

b = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal

X = Variabel independent Sistem Pengendalian Internal

ϵ = Pengaruh Variabel Lain

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan riwayat, dating orang tua dari daerah gorontalo yang bernama Langkay Bu dan Tinggal di Bukit Damar yang saat ini bukti tersebut dalam wilayah Desa Marisa. Kedatangan Langkay Bu di daerah ini untuk mencari anaknya yang hilang yang bernama “Popa” da” eyato”.

Pada waktu itu daerah Popayato masuh merupakan laut dalam dan tepian pantai sapa di Desa Bukit Tingki Sekarang. Alkisah Kedua anak Langkay Bu ini berada disebut pulau yang sekarang dikenal dengan Desa Torosiaje. Sang Kakek ini sangat oenasaran ingin bertemu dan melihat anaknya akantetapi tidak ada perahu yang akan ditumpanginya. Apa yang dilakukan oleh orang tua (Langkay Bu) hanya Pinang (Lomama) dan sepahnya dibuang ke laut.

Kisah itu menyebutkan suatu hal yang luar biasa terjadi bahwa setiap wilayah yang terjangkau dengan wundapo tadi berubah menjadi endapan pasir yang akhirnya menjadi sebuah kampong yang dihuni oleh masyarakat yang diberi nama Popayato.

Nama Popayato inilah yang sampai sekarang di kenal dengan nama Desa Popayato dan juga nama Kecamatan Popayato yang dikenal oleh seluruh masyarakat Gorontalo.

Adapun Luas wilayah Desa Popayato + 7 KM dengan Jumlah Penduduk Tahun 2017 Adalah 1002 Jiwa, Laki – laki = 506, Perempuan = 496 dan 314 KK dengan

Jumlah Dusun adalah 3 Dusun. Mayoritas Penduduk Desa Popayato memeluk Agama Islam, dengan Jumlah suku 5 yakni Suku Gorontalo, Suku Bugis, Suku Tomini, Suku Kaili, Suku Sanger.

Desa Popayato masuk dalam wilayah Kecamatan Popayato dengan Batas – batas sebagai berikut :

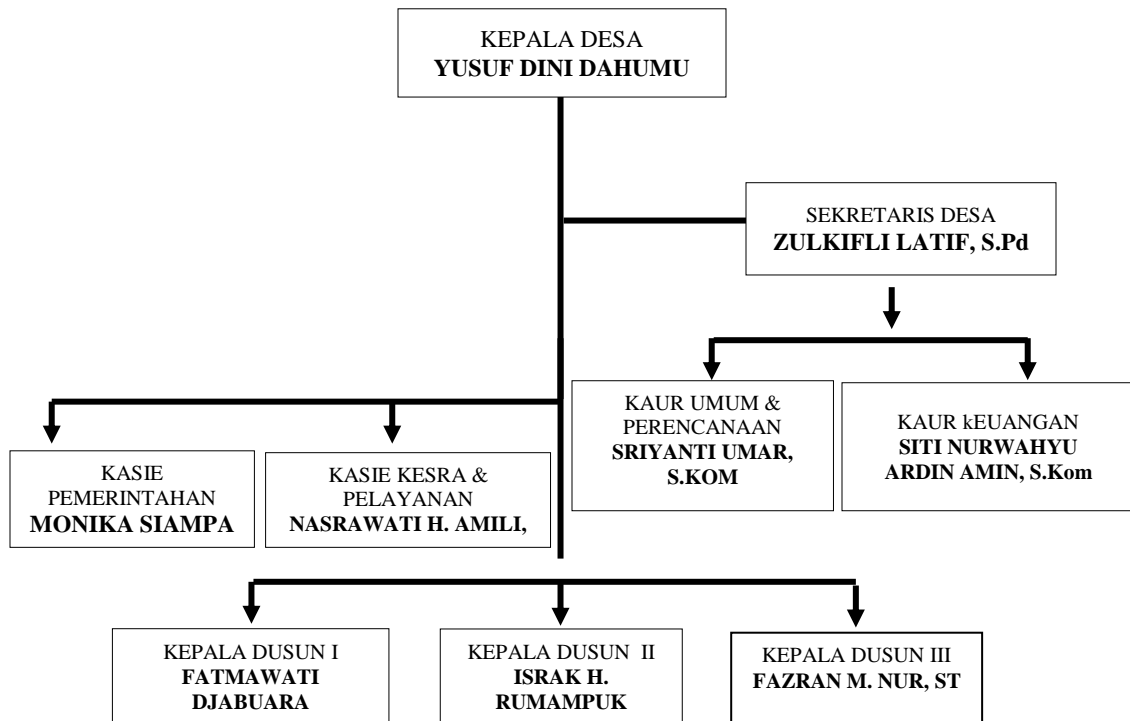
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Tingki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomoni
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maleo Kec. Popayato Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Trikora

Topografi Dese sebagian besar daratan 15 % adalah wilayah pesisir.

Mata Pencaharian Utama Masyarakat Desa Popayato adalah petani dan Nelayan untuk petani di dominasi oleh petani jagung. Luas lahan tanaman jagung saat ini kurang lebih 70 Ha dengan Jumlah Kelompok Tani 7 Kelompok sedang untuk nelayan jumlah kelompok 2 Kelompok.

Mata pencaharian lain yang digeluti masyarakat adalah pedagang (kios) Meubel, Bengkel, Tukang, Penjual Makanan, Penjual Nasi Kuning. Namun masyarakat Desa Popayato tetap menjalin hubungan harmonis antara warga, dan system pemerintah berjalan baik. Adapun struktur pemerintah Desa Popayato adalah sebagai berikut:

Gambar
Struktur Perangkat Desa



4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah variabel sistem pengendalian internal (X), sedangkan variabel terikat yaitu pengelolaan dana desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = $1 \times 1 \times 30 = 30$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = $5 \times 1 \times 30 = 150$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$150 - 30$
Rentang Skala = ----- = 24

Tabel 4.1.

Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
130 – 154	Sangat Baik
105 – 129	Baik
80 – 104	Kurang Baik
55 – 79	Tidak Baik
30 – 54	Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2023

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (X)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 10 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 1**

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 1		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	24	120	80
Setuju	4	6	24	20
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	144	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan Kepala Desa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern diperoleh tanggapan

responden sebanyak 24 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 1 adalah 144 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.3. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 2

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 2		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	17	85	57
Setuju	4	13	52	43
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	137	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang Kantor Desa telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor 85, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52, sehingga total skor item 2 adalah 137 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.4. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 3

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 3		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	17	85	57
Setuju	4	12	48	40
Kurang Setuju	3	1	3	3
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	136	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor 85, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 48, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 3 adalah 136 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 4

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 4		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	6	30	20
Setuju	4	23	92	77
Kurang Setuju	3	1	3	3
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	125	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab sangat setuju dengan skor 30, sebanyak 23 responden atau 77% yang menjawab setuju dengan skor 92 dan 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 4 adalah 125 dan masuk dalam kategori baik.

Tabel 4.6. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 5

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 5		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	24	120	80
Setuju	4	6	24	20
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	144	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada kantor desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas diperoleh tanggapan responden sebanyak 24 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total skor item 5 adalah 144 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.7. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 6

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 6		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	19	95	63
Setuju	4	11	44	37
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	139	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi diperoleh tanggapan responden sebanyak 19 responden atau 63% yang menjawab sangat setuju dengan skor 95, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sehingga total skor item 6 adalah 139 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.8. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 7

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 7		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	12	60	40
Setuju	4	15	60	50
Kurang Setuju	3	3	9	10
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	129	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab setuju dengan skor 60 dan 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9, sehingga total skor item 7 adalah 129 dan masuk dalam kategori baik.

Tabel 4.9. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 8

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 1		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	8	40	27
Setuju	4	17	68	57
Kurang Setuju	3	5	15	17
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	123	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing kantor desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab setuju dengan skor 68 dan 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sehingga total skor item 8 adalah 123 dan masuk dalam kategori baik.

Tabel 4.10. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 9

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 9		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	18	90	60
Setuju	4	12	48	40
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	138	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan kantor desa selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 48, sehingga total skor item 9 adalah 138 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.11. Tanggapan Responden
Variabel Sistem Pengendalian Internal pada Item 10

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 10		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	13	65	43
Setuju	4	17	68	57
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	133	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab setuju dengan skor 68, sehingga total skor item 10 adalah 133 dan masuk dalam kategori sangat baik.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 12 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 1

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 1		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	13	65	43
Setuju	4	14	56	47
Kurang Setuju	3	3	9	10
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	130	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan

skor 65, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 56 dan 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9, sehingga total skor item 1 adalah 130 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.13. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 2

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 2		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	25	125	83
Setuju	4	4	16	13
Kurang Setuju	3	1	3	3
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	144	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 25 responden atau 83% yang menjawab sangat setuju dengan skor 125, sebanyak 4 responden atau 16% yang menjawab setuju dengan skor 13 dan 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 2 adalah 144 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.14. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 3

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 3		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	23	115	77
Setuju	4	7	28	23
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	143	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 23 responden atau 77% yang menjawab sangat setuju dengan skor 115, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 28, sehingga total skor item 3 adalah 143 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.15. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 4

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 4		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	15	75	50
Setuju	4	13	52	43
Kurang Setuju	3	2	6	7
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	133	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang penyediaan informasi yang bertanggung jawab diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 133 dan masuk dalam kategori sangat baik.

**Tabel 4.16. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 5**

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 5		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	14	70	47
Setuju	4	13	52	43
Kurang Setuju	3	3	9	10
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	131	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9, sehingga total skor item 5 adalah 131 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.17. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 6

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 6		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	17	85	57
Setuju	4	9	36	30
Kurang Setuju	3	4	12	13
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	133	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor 85, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36 dan 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 6 adalah 133 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.18. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 7

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 7		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	13	65	43
Setuju	4	13	52	43
Kurang Setuju	3	4	12	13
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	129	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 7 adalah 129 dan masuk dalam kategori baik.

Tabel 4.19. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 8

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 8		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	14	70	47
Setuju	4	11	44	37
Kurang Setuju	3	5	15	17
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	129	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44 dan 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sehingga total skor item 8 adalah 129 dan masuk dalam kategori baik.

Tabel 4.20. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 9

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 9		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	25	125	83
Setuju	4	5	20	17
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	145	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 25 responden atau 83% yang menjawab sangat setuju dengan skor 125, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab setuju dengan skor 20, sehingga total skor item 9 adalah 145 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.21. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 10

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 10		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	27	135	90
Setuju	4	3	12	10
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	147	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 27 responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 135, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 10 adalah 147 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.22. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 11

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 11		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	15	75	50
Setuju	4	13	52	43
Kurang Setuju	3	2	6	7
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	133	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 11 adalah 133 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4.23. Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Desa pada Item 12

Alternatif Jawaban Responden	Bobot	Item 12		
		Frekuensi	Skor	Persen
Sangat Setuju	5	13	65	43
Setuju	4	17	68	57
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total		30	133	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Untuk pernyataan tentang Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab setuju dengan skor 68, sehingga total skor item 12 adalah 133 dan masuk dalam kategori sangat baik.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24. Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.226	14.968		1.017	.318
Sistem Pengendalian Intern	.874	.334	.443	2.615	.014

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi sederhana berikut : $Y = 15,226 + 0,874X + \epsilon$, maka diperoleh persamaan regresi sederhana dimana nilai constant 15,226 yang artinya jika sistem pengendalian internal diabaikan maka capaian Pengelolaan Dana Desa sebesar 15,226.

Koefisien regresi sistem pengendalian internal (X) sebesar 0,874 hal ini berarti bahwa perubahan variabel sistem pengendalian internal (X) akan diikuti oleh perubahan Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato (Y) sebesar 0,874. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh sistem pengendalian internal (X) terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato (Y) adalah positif. Nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 2,615 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Yang berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato (Y). Demikian pula

halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,014 < 0,05$).

Sedangkan untuk koefisien determinasi (R^2), hasil olahan data menunjukkan bahwa :

Tabel 4.25. Model Summary
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.443 ^a	.196	.168	2.977

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Sedangkan untuk koefisien determinasi (R^2), hasil olahan data menunjukkan bahwa, nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,196 yang menjadi gambaran kontribusi variabel sistem pengendalian internal (X) di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato sebesar 19,6% dan sisanya sebesar 80,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.2. Analisis Korelasi dan Uji Signifikan

Dalam penelitian ini, hubungan atau korelasi antara variabel sistem pengendalian internal (X) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato (Y), diperoleh hasil olahan data pada table berikut ini :

**Tabel 4.26. Uji Signifikan
Correlations**

		Pengelolaan Dana Desa	Sistem Pengendalian Intern
Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	1	.443**
	Sig. (1-tailed)		.007
	N	30	30
Sistem Pengendalian Intern	Pearson Correlation	.443**	1
	Sig. (1-tailed)	.007	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.26 di atas, korelasi variable sistem pengendalian internal (X) dan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) diperoleh nilai 0,443, yang artinya bahwa, korelasi antar kedua variable tersebut masuk dalam kategori hubungan yang kuat yaitu 44,3%. Korelasi sistem pengendalian internal (X) dan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah signifikan.

Hal ini dapat dijelaskan dengan cara membandingkan antara taraf signifikan dengan nilai signifikan dalam hasil olahan data. Dalam penelitian telah ditentukan taraf signifikan yang digunakan adalah sebesar 0,05 sedangkan hasil olahan data diperoleh nilai signifikan sebesar 0,007 ($0,007 > 0,05$), dengan demikian hubungan atau korelasi antara variable sistem pengendalian internal (X) dan variabel pengelolaan dana desa (Y) adalah signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato sebesar 0,007 ($0,007 > 0,05$). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

5.2. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi :

1. Pemerintah Desa diharapkan dapat mempertahankan Sistem Pengendalian Internalnya dan disarankan untuk memberdayakan Sarjana Ekonomi dalam penempatan jabatan Kaur Keuangan.
2. Disarankan kepada pengguna anggaran/pemegang kas agar dalam hal penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) harus tepat waktu, karena berdasarkan tanggapan responden diperoleh jawaban masih rendah atau belum maksimal.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan yang ada di Desa Popayato Kecamatan

Popayato Kabupaten Pohuwato, seperti kompetensi aparat, komitmen organisai, ketaatan pelaporan, transparansi dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Adisty C. 2012. *Asuhan Gizi Nutritional Care Process*. Yogyakarta
- Chung, N.T., *et all*. 2015. *Impact of Seasonal Climate Varibility on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam*. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program I B M S P S S*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kumaat, Valarey G. (2011). *Internal Audit*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lapananda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Penerbit Rm-books. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D". Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

_____, No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Internal.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

_____, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.

Yayuk Yulianti. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

W. J. S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

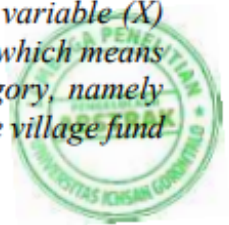
[illegible]

ABSTRACT

SITI NURSUCIA ARDIN. E2119173. THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON VILLAGE FUND MANAGEMENT IN POPAYATO VILLAGE, POPAYATO SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

The role of the internal control system is vital in creating an efficient, effective, and reliable government. This research aims to determine and analyze the effect of the internal control system on village funds management in Popayatao Village, Popayato Subdistrict, Pohuwato District. Based on the results of data processing using SPSS-16, the correlation between the Internal Control System variable (X) and the village fund management variable (Y) gains a value of 0.443, which means that the correlation between the two variables is in the strong category, namely 44.3%. The correlation between the internal control system (X) and the village fund management variable (Y) is significant at 0.007 ($0.007 > 0.05$).

Keywords: internal control system, village fund management



ABSTRAK

SITI NURSUCIA ARDIN. E2119173. PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA POPAYATO KECAMATAN POPAYATO KABUPATEN POHUWATO

Peranan dari sistem pengendalian internal sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Popayatao Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh korelasi variable Sistem Pengendalian Internal (X) dan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) diperoleh nilai 0,443, yang artinya bahwa, korelasi antar kedua variable tersebut masuk dalam kategori hubungan yang kuat yaitu 44,3%. Korelasi sistem pengendalian internal (X) dan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah signifikan sebesar 0,007 ($0,007 > 0,05$).

Kata kunci: sistem pengendalian internal, pengelolaan dana desa



Lampiran 2

KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato” Maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

Siti Nursucia Ardin
NIM E21.19.173

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Y)

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					
3	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					

No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X)

No	Pernyataan Indikator Lingkungan Pengendalian	SS	S	KS	TS	STS
1	Kepala Desa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern					
2	Kantor Desa telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi					

No	Pernyataan Indikator Penilaian Resiko	SS	S	KS	TS	STS
1	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem keuangan.					
2	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur keuangan.					

No	Pernyataan Indikator Pengendalian	SS	S	KS	TS	STS
1	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada kantor Desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas					
2	Instansi Pemerintah telah mengembangkan					

	rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi					
--	--	--	--	--	--	--

No	Pernyataan Indikator Informasi Komunikasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif					
2	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing kantor Desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya					

No	Pernyataan Indikator Pemantauan dan Pengendalian Intern	SS	S	KS	TS	STS
1	Kantor desa selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/review maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern					
2	Pimpinan selalu mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					

Lampiran 3

TABULASI DATA

N	Variabel Sistem Pengendalian Internal (X)										Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	44
2	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	47
3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
6	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
7	5	5	4	4	5	5	4	3	5	4	44
8	5	4	5	4	4	5	4	3	5	5	44
9	5	5	3	4	5	5	4	4	4	4	43
10	5	4	4	4	5	5	3	4	5	4	43
11	5	5	5	5	4	5	4	3	5	5	46
12	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	43
13	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	43
14	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	45
15	5	5	4	4	5	5	3	4	4	4	43
16	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	47
17	5	4	5	5	5	4	3	4	5	5	45
18	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	46
19	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	48
20	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	46
21	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	44
22	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	46
23	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	46
24	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	47
25	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
26	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
27	5	5	4	3	5	5	4	4	5	4	44
28	5	4	5	4	4	5	4	3	5	5	44
29	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	44
30	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	44

No	Pengelolaan Dana Desa (Y)												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	55
2	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	54
3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
4	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	56
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
6	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	54
7	3	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	54
8	4	5	5	4	5	4	3	3	5	5	4	4	51
9	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	4	51
10	4	5	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	49
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
12	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	50
13	4	4	5	5	4	5	3	4	4	5	3	4	50
14	4	5	5	5	3	5	4	4	4	5	3	4	51
15	4	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	52
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
17	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	56
18	4	5	4	4	3	4	5	4	5	5	5	4	52
19	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	57
20	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56
21	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	4	54
22	4	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	54
23	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
24	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	56
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
26	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	54
27	3	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	54
28	4	5	5	4	5	4	3	3	5	5	4	4	51
29	4	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	4	52
30	4	5	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	51

Lampiran 4

OUTPUT SPSS

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.443 ^a	.196	.168	2.977

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60.568	1	60.568	6.836	.014 ^a
	Residual	248.098	28	8.861		
	Total	308.667	29			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.226	14.968		1.017	.318
	Sistem Pengendalian Intern	.874	.334	.443	2.615	.014

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Correlations

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengelolaan Dana Desa	54.33	3.262	30
Sistem Pengendalian Intern	44.77	1.654	30

Correlations

		Pengelolaan Dana Desa	Sistem Pengendalian Intern
Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	1	.443**
	Sig. (1-tailed)		.007
	N	30	30
Sistem Pengendalian Intern	Pearson Correlation	.443**	1
	Sig. (1-tailed)	.007	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-mail lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.: 090/PIP/LEMLIT-UNISAN/X/2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada YTH.
Kepala Desa Popayato
Di
Tempat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Siti Nur Sucia Ardin
NIM : E2119173
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Popayato
Judul penelitian : Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa di Popayato kecamatan popayato kabupaten Pohuwato.

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 Oktober 2022

Ketua,

DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



Lampiran 6

SURAT BALASAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN POPAYATO
DESA POPAYATO**

Alamat : Jl. Desa Popayato, Kompleks Lapangan 10 November, Desa Popayato, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/DS-POP/ / IV /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YUSUF DINI DAHUMU
Jabatan : KEPALA DESA POPAYATO
Alamat : Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : SITI NUR SUCIA ARDIN
TTL : Popayato, 28 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : E2119173
Program Studi : Pelajar/Mahasiswa
Lokasi : Kantor Desa Popayato Kec. Popayato kab. Pohuwato
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Popayato Kec. Popayato kab. Pohuwato

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Desa Popayato
Tanggal : 22 April 2023
KEPALA DESA POPAYATO


YUSUF DINI DAHUMU

Lampiran 7

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 171/SRP/FE-UNISAN/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Siti Nur Sucia Ardin
NIM : E2119173
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Popayato Induk
Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 11%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901


Gorontalo, 18 September 2023
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

Lampiran 8

HASIL TURNITIN

turnitin™

Similarity Report ID: oid:25211:38413442

PAPER NAME

FILE TURNITIN SKRIPSI SUCI.docx

AUTHOR

Siti Nur Sucia Ardin

WORD COUNT

10787 Words

CHARACTER COUNT

69783 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

218.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 30, 2023 6:38 PM GMT+7

REPORT DATE

Jun 30, 2023 6:39 PM GMT+7

● 11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

• 10% Internet database

• 1% Publications database

• Crossref database

• Crossref Posted Content database

• 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

• Bibliographic material

• Quoted material

• Cited material

• Small Matches (Less than 30 words)

11% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 10% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unwim.ac.id	3%
	Internet	
2	eprints.polsri.ac.id	1%
	Internet	
3	repository.ibik.ac.id	1%
	Internet	
4	eprints.unpak.ac.id	<1%
	Internet	
5	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
6	repository.unair.ac.id	<1%
	Internet	
7	makalah.my.id	<1%
	Internet	
8	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	

9	docplayer.info Internet	<1%
10	scribd.com Internet	<1%
11	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 Submitted works	<1%
12	repository.unibos.ac.id Internet	<1%
13	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16 Submitted works	<1%
14	repository.widyatama.ac.id Internet	<1%

Lampiran 9

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	: Siti Nur sucia Ardin
NIM	: E2119173
Tempat/TglLahir	: Popayato, 28 Desember 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2019
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Konsentrasi	: Keuangan
Alamat	: Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 1 Popayato pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di MTS AL-KHAIRAT Popayato pada tahun 2014
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA NEGERI 1 Popayato pada tahun 2017.
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.